
PENURUNAN INDEKS DEMOKRASI DAN PERSEPSI KORUPSI

Seri Policy Brief Populi Center, No.3. 15 Maret 2021

Darin Atiandina

Peneliti, Populi Center

darin@populicenter.org

Rafif Pamenang Imawan

Peneliti, Populi Center

rafif.imawan@populicenter.org

Pengantar

Berdasarkan Laporan Indeks Demokrasi 2020 yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit* (EIU), skor demokrasi di Indonesia menunjukkan angka terendah dalam waktu 14 tahun terakhir. Indonesia menduduki peringkat ke-64 di dunia dengan skor 6.3. Meski dalam segi peringkat Indonesia masih tetap sama dengan tahun 2019, namun skor tersebut menunjukkan penurunan dari skor sebelumnya 6,48. Ada lima indikator yang digunakan EIU untuk menjadi tolak ukur dalam menentukan indeks demokrasi antara lain proses pemilu dan pluralisme (skor 7,92), fungsi dan kinerja pemerintah (skor 7,50), partisipasi politik (skor 6,11), budaya politik (skor 4.38), serta kebebasan sipil (skor 5,59). Dari kelima indikator tersebut, nilai terendah untuk Indonesia ada pada budaya politik (EIU, 2021:10; Tempo, 09/02/2021).

Di sisi lain, peringkat *Corruption Perception Index* (CPI) Indonesia juga mengalami penurunan. Berdasarkan laporan *Transparency International* (TI), peringkat Indonesia turun dari peringkat 85 dengan skor 40 di tahun 2019, menjadi peringkat 102 dengan skor 37. Skala penilaian skor ini adalah 0 untuk sangat korup dan 100 untuk bersih dari korupsi (Transparency International, 28/01/2021). Di kawasan ASEAN, Indonesia berada di posisi ke lima di bawah Singapura (skor 85), Brunei Darussalam (skor 60), Malaysia (skor 551), dan

Timor Leste (skor 40). Terdapat sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur CPI suatu negara, yakni investasi ekonomi, penegakan hukum, perbaikan layanan atau birokrasi yang berhubungan dengan korupsi, serta pelaksanaan pemilu.

Masalah

Salah satu aspek yang mengakibatkan terjadinya penurunan angka indeks demokrasi dan korupsi di Indonesia adalah komunikasi politik pemerintah yang lemah dalam mengartikulasikan setiap kebijakan yang diambilnya. Pemerintah tampak sering mengalami *blunder* dan memicu kontroversi publik sehingga kebijakan yang sudah dirancangannya sering tertunda, mengalami revisi sejak sebelum dilaksanakan, atau bahkan dibatalkan implementasinya. Kinerja KPK, misalnya, yang mampu menyelamatkan uang negara melalui

“**... Pemerintah tampak sering mengalami blunder dan memicu kontroversi publik sehingga kebijakan yang sudah dirancangannya sering tertunda, mengalami revisi sejak sebelum dilaksanakan, atau bahkan dibatalkan implementasinya.**”

upaya pencegahan tidak pernah secara baik dikomunikasikan kepada publik yang terlanjur mengidentikkan KPK dengan penangkapan koruptor. Di sisi lain, meskipun pada dasarnya hampir seluruh warga negara sedang mengalami euforia kebebasan berpendapat melalui berbagai kanal media sosial, namun beberapa kasus penanganan perkara-perkara seperti berita bohong, penghinaan personal, ancaman kekerasan,

protes masyarakat terkait kebijakan penanganan COVID-19, dll. melalui penerapan UU ITE memberi kesan kuat seolah-olah kebebasan berpendapat dan berekspresi sedang mengalami kemunduran saat ini.

Analisa

Berdasarkan pengantar di atas, terdapat dua persoalan yang harus segera direspons oleh pemerintah yakni penurunan indeks demokrasi dan korupsi. Akan tetapi, yang harus menjadi catatan serta dipahami bersama sejak awal adalah penyusunan indeks, baik demokrasi, korupsi, atau hal lain, tidak bebas nilai. Artinya, indikator atau pengukurannya dapat diperdebatkan. Meski demikian, respons pemerintah tetap diperlukan mengingat salah satu tolak ukur untuk meningkatkan indeks demokrasi atau CPI suatu negara adalah *kinerja pemerintah*.

Demokrasi

Berdasarkan laporan yang dirilis oleh *The Economist Intelligence Unit* (2020), indeks demokrasi di Indonesia disebutkan menurun dan menempati skor terendah dalam waktu 14 tahun terakhir. Namun, apabila merujuk pada laporan yang sama, indeks demokrasi di Indonesia justru ada pada posisi stabil dengan skor di atas 6 sejak 14 tahun terakhir.

Tabel 1.
Indeks Demokrasi

| Tahun | Indeks Demokrasi Indonesia |
|-------|----------------------------|
| 2006 | 6,41 |
| 2008 | 6,34 |
| 2010 | 6,53 |
| 2011 | 6,53 |
| 2012 | 6,76 |
| 2013 | 6,82 |
| 2014 | 6,95 |
| 2015 | 7,03 |
| 2016 | 6,97 |
| 2017 | 6,39 |
| 2018 | 6,39 |
| 2019 | 6,48 |
| 2020 | 6,30 |

Sumber: EIU, 2021:24.

Berdasarkan laporan EIU, indeks demokrasi di Indonesia menunjukkan skor tertinggi pada era kepemimpinan Presiden Joko Widodo, yakni dengan skor 7,03 pada tahun 2015. Setelah memperoleh indeks tertinggi pada tahun 2015, indeks demokrasi di Indonesia kemudian menurun dengan skor 6,97 pada tahun 2016. Hal ini disebabkan karena beberapa hal, di antaranya meningkatnya gerakan politik Islam-Kanan paska Pilkada DKI Jakarta 2016 yang mendorong banyak aksi intoleransi di Indonesia.

Indeks demokrasi di Indonesia kemudian meningkat pada tahun 2019 dengan skor 6,48 hingga akhirnya kembali menurun pada tahun 2020 dengan skor 6.30. Yang harus menjadi catatan penting, penurunan ini terjadi seiring dengan penurunan rata-rata indeks demokrasi secara

“ ... Landasan terkuat untuk kebijakan tersebut adalah bahwa dalam kondisi darurat maka keselamatan nyawa manusia merupakan hukum yang utama, sehingga hak-hak warga yang sifatnya derogable untuk sementara dapat dikesampingkan. ”

global. Dalam laporan EIU, rata-rata skor indeks demokrasi di dunia tahun 2020 adalah 3,37, menurun dari yang sebelumnya 5,44. Angka ini pun tercatat sebagai rata-rata skor indeks demokrasi terendah sejak EIU merilis laporan tahunan pada 2006 (DW, 04/02/2021)

Pandemi COVID-19 menjadi salah satu di antara banyak faktor yang memberikan dampak kepada demokrasi dan kebebasan di dunia. Penyebaran dan jatuhnya korban nyawa akibat virus COVID-19 mengharuskan pemerintah di banyak negara, termasuk Indonesia, mengambil kebijakan secara cepat dan taktis, yang kadang terpaksa harus diambil tanpa konsultasi publik terlebih dahulu. Pemerintah Indonesia, misalnya, harus secara cepat dan cermat

memberlakukan pembatasan pergerakan warga demi menekan penyebaran virus COVID-19 yang berlangsung sangat cepat. Landasan terkuat untuk kebijakan tersebut adalah bahwa dalam kondisi darurat maka keselamatan nyawa manusia merupakan hukum yang utama, sehingga hak-hak warga yang sifatnya *derogable* untuk sementara dapat dikesampingkan.

Contoh kedua yang adalah ketika pemerintah mengesahkan UU Cipta Kerja saat kebijakan pembatasan pergerakan warga diberlakukan. Kebijakan pembatasan membuat warga yang menolak UU Cipta Kerja tidak bisa menyampaikan aspirasinya lewat demonstrasi. Belum lagi, ketika masyarakat memilih menyalurkan perbedaan posisi dengan pemerintah sering kali dikenakan pasal UU ITE. Pada aspek yang berbeda, pembatasan mobilitas fisik melalui kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) juga dianggap sebagai kebijakan yang mencederai aspek kebebasan sipil dan kebebasan berbicara. Pembatasan mobilitas fisik menjadi salah satu poin penting yang menjelaskan mengapa indeks demokrasi di Indonesia versi EIU mengalami penurunan. Kontrol mobilitas warga dianggap sebagai bagian dari intervensi pemerintah.

Korupsi

Penurunan indeks korupsi di Indonesia disebabkan karena penurunan tiga indikator utama. Pertama, stagnasi hingga penurunan kegiatan ekonomi global. Stagnasi dalam kegiatan ekonomi dinilai pula sebagai stagnasi penanganan korupsi. Kedua, penegakan hukum yang belum disertai dengan perbaikan kualitas layanan birokrasi. Belum kuatnya komitmen birokrasi untuk memperbaiki diri, dianggap menjadi salah satu faktor penurunan birokrasi, terutama mengingat birokrasi kerap dianggap sebagai lumbung tindak korupsi. Ketiga, indikator politik dan pemilu yang masih ditandai rentannya korupsi uang (Transparency International, 28/01/2021).

Indeks yang dipublikasikan oleh *transparency international* ini problematik dan tidak memiliki argumentasi yang cukup kuat. Ini bisa dilihat dari dua proposisi yang diajukannya. Pertama, disebutkan bahwa dalam hal alokasi anggaran publik yang esensial, negara dengan tingkat korupsi yang tinggi cenderung mengeluarkan uang yang lebih sedikit untuk kesehatan. Kedua, negara dengan tingkat korupsi yang tinggi, cenderung merespons krisis dengan cara-cara yang kurang demokratis (Transparency International, 28/01/2021). Dua proposisi tersebut bisa dilihat sebagai akibat dari pengabaian atas fakta bahwa alokasi anggaran publik sangat bergantung pada kondisi perekonomian masing-masing negara, sehingga tidak bisa ditarik kesimpulan yang simplistik seperti itu. Negara yang perekonomiannya sedang tumbuh harus dapat menyeimbangkan aspek ekonomi dan kesehatan. Kegagalan menyeimbangkan dua sektor tersebut tidak akan menghasilkan akibat positif kepada salah satunya melainkan justru

“ ... Penyebarluasan pandemi yang sangat cepat membutuhkan tindakan yang sangat taktis, terukur dan cepat.”

dapat berbalik menghancurkan perekonomian dan memperparah kondisi kesehatan warga. Di lain pihak, negara-negara dengan ekonomi yang kuat akan dengan mudah meletakkan prioritas alokasi anggaran pada bidang-bidang atau aspek terkait kesehatan.

Kelemahan lain dari proposisi Indeks Persepsi Korupsi Transparansi International di atas juga terletak pada kegagalannya melihat kompleksitas persoalan yang dihadapi pemerintahan setiap negara dalam kondisi darurat oleh pandemi. Setiap pemerintahan yang menghadapi ledakan pandemi benar-benar berpacu dengan waktu dan kematian warganya.

Penyebarluasan pandemi yang sangat cepat membutuhkan tindakan yang sangat taktis, terukur dan cepat. Pada kasus seperti itu, menyerahkan keputusan politik pada prosedur-prosedur demokrasi yang sering berlarut-larut dan tidak efektif dalam waktu hanya memiliki konsekuensi yang sangat serius pada nyawa warga negara. Karena itu, dalam kondisi krisis putusan-putusan yang tidak sepenuhnya menaati prosedur-prosedur formal demokrasi sering tidak bisa dihindari. Tapi bahkan dalam putusan-putusan darurat yang sebagiannya mengesampingkan prosedur demokrasi pun, hubungannya korupsi tidaklah berlangsung otomatis.

Untuk kasus pemerintah Indonesia, komitmen dan tindakan penanganan korupsi juga tidaklah sepenuhnya buruk. Selama pandemi 2020-2021, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup banyak melakukan tindakan penangkapan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi di berbagai instansi, termasuk pada kasus dana bantuan sosial (CNN Indonesia, 21/12/2020). Pada konteks laporan *Transparency International* kali ini, penggabungan antara korupsi dan demokrasi tidak relevan. Terutama apabila menyoal tindakan-tindakan pandemi COVID-19 yang memaksa kekuasaan untuk tersentral dalam satu komando.

Rekomendasi

1. Aspek komunikasi publik dari pemerintah perlu untuk dibenahi. Terdapat dua strategi yang dapat diambil. Pertama, membenahi juru bicara presiden yang ada, serta memperkuat KSP sebagai lembaga *think tank*. Kedua, merekrut juru bicara yang berasal dari kalangan intelektual. Terutama untuk menjelaskan dimensi taktis dan akademis dari kebijakan yang diambil oleh pemerintah.
2. KSP perlu diperkuat sebagai lembaga *think tank* yang taktis, salah satunya dengan merekrut kalangan intelektual yang dapat memberikan masukan-masukan strategis, serta berkomunikasi kepada publik terkait dengan pilihan kebijakan yang diambil.
3. Pemerintah tetap mempertahankan Kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Mikro yang menekankan pada pembatasan aktivitas di tingkat kelurahan. Kebijakan ini pada penerapannya banyak melibatkan partisipasi warga, sehingga penilaian warga tidak dilibatkan dalam perumusan kebijakan penanganan COVID-19 yang berdampak pada penurunan indeks demokrasi tidak berlaku.
4. Pemerintah perlu mengevaluasi penerapan PPKM Mikro terutama yang berkaitan dengan partisipasi warga. Pemerintah perlu mengundang *stakeholders* terkait, utamanya elemen masyarakat sipil. Tujuannya agar masyarakat yang menjadi pelaksana dari PPKM Mikro, bukan polisi atau militer.
5. Jika diperlukan, pemerintah dapat memperluas representasi publik dalam satgas penanganan COVID-19. Hal ini penting sebagai bagian dari representasi politik yang dinilai turun dalam indeks demokrasi versi EIU.
6. Jika dimungkinkan, terdapat kanal pengaduan warga terkait dengan COVID-19 yang terpusat, seperti Qlue di DKI Jakarta. Selain memungkinkan warga berpartisipasi dalam aspek penanganan pandemi COVID-19, hal ini berguna untuk mendapatkan *update* penyebaran pandemi COVID-19 dari warga.
7. Dalam hal penanganan korupsi KPK membutuhkan juru bicara yang memiliki kemampuan komunikasi sangat bagus sehingga apa yang disampaikan dapat dengan mudah dipahami oleh masyarakat. Di bawah kepemimpinan Firli Bahuri, KPK tidak memiliki juru bicara yang mumpuni, seperti Febri Diansyah atau

Johan Budi yang menjadi juru bicara KPK pada periode sebelumnya. Peran dari sosok seorang juru bicara KPK yang mumpuni ini sangat penting karena ia harus bisa menjelaskan secara jernih dan bernas tentang berbagai upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi yang telah, sedang, dan akan dilakukan. Masyarakat perlu mendapat informasi yang benar tentang, misalnya, pendekatan utama KPK dalam melakukan pencegahan tindak pidana korupsi sehingga keberhasilan kinerja lembaga ini tidak bisa semata-mata hanya dilihat dari jumlah operasi penangkapan pelaku korupsi.

Referensi

- CNN Indonesia, 21 Desember 2020, *Korupsi Dana Bansos Mengalir Sampai Jauh*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20201221083701-12-584563/korupsi-dana-bansos-mengalir-sampai-jauh>
- CNN Indonesia, 28 Januari 2021, *Ranking Indeks Korupsi Indonesia Merosot, Urutan 102 dari 180*, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20210128134510-12-599524/ranking-indeks-korupsi-indonesia-merosot-urutan-102-dari-180>
- DW, 04 Februari 2021, *Indeks Demokrasi 2020: Indonesia Catat Skor Terendah dalam 14 Tahun Terakhir*, <https://www.dw.com/id/indeks-demokrasi-indonesia-catat-skor-terendah-dalam-sejarah/a-56448378>
- Kompas, 14 September 2020, Firlil: *KPK Selamatkan Uang Rp 90,5 Triliun untuk Negara dan Daerah*, <https://nasional.kompas.com/read/2020/09/14/17513221/firli-kpk-selamatkan-uang-rp-905-triliun-untuk-negara-dan-daerah>.
- Tempo, 9 Februari 2020, *Indeks Demokrasi Indonesia Turun, Fadli Zon: Berdampak ke Penanganan Pandemi*, <https://nasional.tempo.co/read/1431022/indeks-demokrasi-indonesia-turun-fadli-zon-berdampak-ke-penanganan-pandemi>
- The Economist Intelligence Unit (EIU), (2021), *Democracy Index 2020: In sickness and in health?*, London: The Economist Intelligence Unit
- The Economist, 2 Februari 2021, *Global democracy has a very bad year*, <https://www.economist.com/graphic-detail/2021/02/02/global-democracy-has-a-very-bad-year>
- Transparency International, 28 Januari 2021, *Korupsi dan COVID-19: Memperburuk Kemunduran Demokrasi*, Jakarta: Transparency International

Populi Center adalah lembaga nirlaba untuk pengkajian opini publik dan kebijakan publik yang berkedudukan di Jakarta di bawah badan hukum Yayasan Populi Indonesia

Populi Center | Telp. (021) 22123150 | info@populicenter.org
Jl. Letjen S Parman Kav 5-6 Kompleks Mandiri Blok O No. 12 Slipi, Jakarta Barat 11480